

**BAHAN AJAR**

**STRUKTUR SOSIAL :  
STRATIFIKASI SOSIAL**

**Mata kuliah Struktur dan Proses Sosial**

Jurusan Pendidikan Sejarah

FPIPS UPI Bandung

**Oleh :**

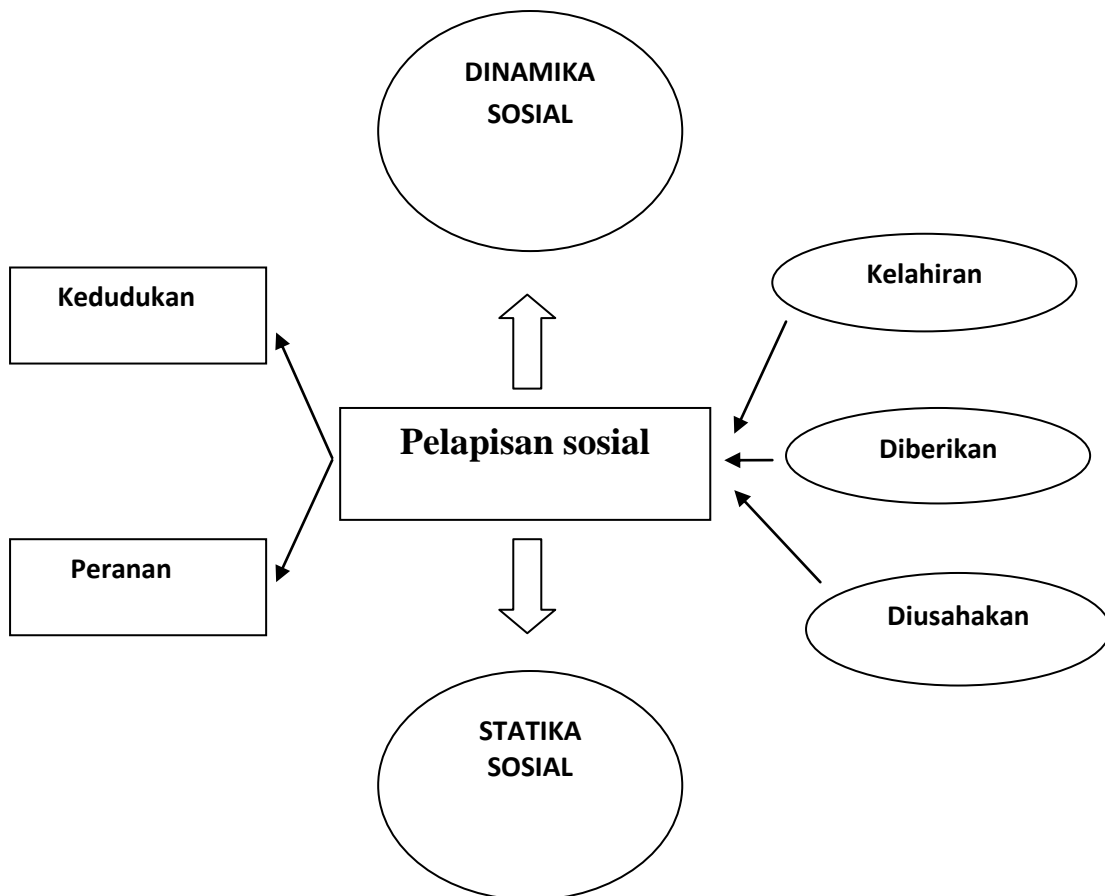
**Drs. Syarif Moeis**

**NIP : 131 811 175**



**JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG 2008**

## Peta Konsep



## 1. Pendahuluan

Dari berbagai perbedaan kehidupan manusia, satu bentuk variasi kehidupan mereka yang menonjol adalah fenomena stratifikasi (tingkatan-tingkatan) sosial. Perbedaan itu tidak semata-mata ada, tetapi melalui proses; suatu bentuk kehidupan (bisa berupa gagasan, nilai, norma, aktifitas sosial, maupun benda-benda) akan ada dalam masyarakat karena mereka menganggap bentuk kehidupan itu benar, baik dan berguna untuk mereka. Fenomena dari stratifikasi sosial ini akan selalu ada dalam kehidupan manusia, sesederhana apapun kehidupan mereka, tetapi bentuknya mungkin berbeda satu sama lain, semua tergantung bagaimana mereka menempatkannya.

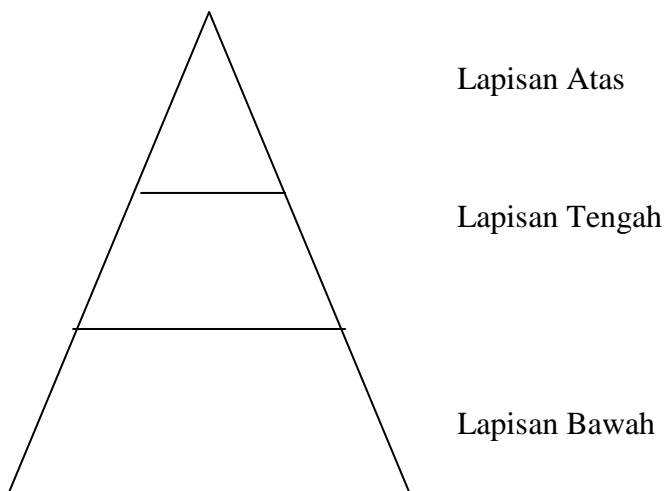
Stratifikasi sosial berasal dari istilah *Social Stratification* yang berarti Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat; kata *Stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya : strata) yang berarti lapisan; stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat kedalam kelas-kelas secara bertingkat (hierarkis). Selama dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargai, maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem yang berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan atau mungkin keturunan dari orang terhormat.

Seorang sosiolog, Pitirin A. Sorokin (1957) mengatakan bahwa sistem berlapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak, suatu keadaan tidak semua orang bisa demikian bahkan hanya sedikit orang yang bisa, dianggap oleh masyarakat berkedudukan tinggi atau ditempatkan pada lapisan atas masyarakat; dan mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut, dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Atau ditempatkan pada lapisan bawah masyarakat. Perbedaan kedudukan manusia dalam masyarakatnya secara langsung menunjuk pada perbedaan pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, tanggung jawab nilai-nilai sosial dan perbedaan pengaruh di antara anggota-anggota masyarakat.

Sejak manusia mengenal adanya suatu bentuk kehidupan bersama di dalam bentuk organisasi sosial, lapisan-lapisan masyarakat mulai timbul. Pada masyarakat dengan kehidupan yang masih sederhana, pelapisan itu dimulai atas dasar perbedaan gender dan usia, perbedaan antara pemimpin atau yang dianggap sebagai pemimpin dengan yang dipimpin, atau perbedaan berdasarkan kekayaan. Seorang ahli filsafat, Aristoteles, pernah mengatakan bahwa dalam tiap-tiap negara terdapat tiga unsur ukuran kedudukan manusia dalam masyarakat, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Sedangkan pada masyarakat yang relatif kompleks dan maju tingkat kehidupannya, maka semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat itu,

keadaan ini mudah untuk dimengerti karena jumlah manusia yang semakin banyak maka kedudukan (pembagian tugas-kerja), hak-hak, kewajiban, serta tanggung jawab sosial menjadi semakin kompleks pula.

kalau dinyatakan dalam bentuk gambar, secara sederhana pada umumnya sistem pelapisan sosial akan berbentuk seperti :



## **2. Dasar Timbulnya Pelapisan Sosial**

Telah kita ketahui sebelumnya bahwa dasar pokok timbulnya sistem pelapisan dalam masyarakat itu karena adanya sistem penilaian atau penghargaan terhadap berbagai hal dalam masyarakat tersebut; berkenaan dengan potensi, kapasitas atau kemampuan manusia yang tidak sama satu dengan yang lain, dengan sendirinya sesuatu yang dianggap bernilai atau berharga itu juga menjadi keadaan yang langka, orang akan senantiasa meraih penghargaan itu dengan sekuat tenaga baik melalui persaingan bahkan tidak jarang dengan melalui konflik fisik.

Fenomena kekuasaan misalnya, hampir semua orang memiliki dorongan untuk berkuasa baik untuk kelompok skala kecil sampai skala besar, tetapi tidak bisa semua orang bisa menjadi penguasa; ada mekanisme pengaturan dalam masyarakat tentang kekuasaan ini, setiap masyarakat atau bahkan kelompok pasti mempunyai ukuran tentang idealisme diberadakkannya unsur penguasaan dalam masyarakat atau kelompoknya, sekurangnya

penguasa ini dianggap sebagai simbol atau figur yang dapat memimpin, mengatur, atau mewakili aspirasi kelompok. Tidak mungkin simbol atau figur ini di bagi rata pada setiap anggota kelompok, orang akan mempercayakan kekuasaan ini sekurangnya pada satu orang atau bahkan beberapa orang yang dianggap dapat memimpin orang banyak; tentang bagaimana prosesnya sehingga penguasaan itu ada pada kelompok atau masyarakat, apakah melalui pemilihan atau melalui unsur paksaan, itu persoalan lain.

Dalam masyarakat yang kompleks, agaknya tidak efektif lagi bila kekuasaan itu pada satu tangan, kekuasaan pada keadaan ini mulai disebar pada individu-individu sesuai dengan kemampuan, potensi, keterampilan dan pengalaman masing-masing; hanya tetap saja koordinasi ada pada satu tangan.

Sekurangnya ada dua proses timbulnya pelapisan dalam masyarakat itu; pertama, terjadi dengan sendirinya, dan ke-dua sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama.

Proses yang *pertama*, pelapisan sosial itu terjadi karena tingkat umur (*age stratification*), dalam sistem ini masing-masing anggota menurut klasifikasi umur mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda; untuk masyarakat-masyarakat tertentu, ada keistimewaan dari seorang anak sulung dimana dengan nilai-nilai sosial yang berlaku mereka mendapat prioritas dalam pewarisan atau kekuasaan. Azas senioritas yang ada dalam sistem pelapisan ini dijumpai pula dalam bidang pekerjaan, agaknya ada hubungan yang erat antara usia seorang karyawan dengan pangkat atau kedudukan yang ditempatinya. Initerjadi karena dalam organisasi tersebut pada dasarnya karyawan hanya dapat memperoleh kenaikan pangkat setelah berselang suatu jangka waktu tertentu – misalnya dua tahun, atau empat tahun; karena jabatan dalam organisasi hanya dapat dipangku oleh karyawan yang telah mencapai suatu pangkat minimal tertentu; dan karena dalam hal terdapat suatu lowongan jabatan baru, karyawan yang dipertimbangkan untuk mengisinya ialah mereka yang dianggap paling senior.

Walaupun tidak mutlak benar, faktor kepandaian atau kecerdasan (*intellegensia*) pada umumnya masing dipakai sebagai tolok ukur untuk membedakan orang dengan orang lainnya; dikatakan tidak mutlak benar, karena dalam penelitian modern ternyata faktor kecerdasan ini tidak sekedar hanya bisa dibangkitkan, dikembangkan bahkan juga bisa ditingkatkan yaitu dengan melalui latihan-latihan tertentu sehingga kedua belah bagian otak kiri dan kanan terangsang untuk berfikir, kreatif secara benar.

Faktor kepandaian atau kecerdasan (*Intellegensia*) seolah-olah memilah kelompok sekurangnya menjadi dua, yaitu orang-orang yang dianggap mempunyai kepandaian yang lebih dan orang-orang yang berkepandaian kurang, dalam istilah sehari-hari orang-orang yang kurang pandai ini dikatakan sebagai orang yang ‘susah mengingat-gampang lupa’. Kepandaian disini harus dibedakan dengan keterampilan, ada orang pandai tetapi tidak terampil, ada orang yang terampil tetapi tidak pandai, ada orang yang tidak pandai tetapi tidak terampil dan yang paling baik adalah orang yang pandai tetapi juga terampil.

Faktor ketidak sengajaannya adalah *kekerabatan*, maksud kekerabatan disini adalah kedudukan orang perorangan terhadap kedekatannya dengan sumber kekerabatan itu.

Biasanya faktor kekerabatan disini berhubungan dengan kedudukan dalam keluarga atau menyangkut sistem pewarisan. Semakin jauh hubungan kerabatnya maka semakin kecil kesempatan seseorang untuk menempati kedudukan tertentu dalam keluarga atau bahkan semakin kecil pula kesempatannya untuk memperoleh seperangkat fasilitas yang diwariskan oleh keluarganya. Tidak seluruh anggota keluarga dapat menjadi ketua adat pada salah satu keluarga Batak Toba misalnya, selama individu tersebut tidak memiliki akses kuat dalam keluarga yang bersangkutan, atau misalnya yang berlaku pada kelompok Dayak Iban di Kalimantan, atau banyak lagi kelompok-kelompok yang tersebar di belahan bumi Indonesia dengan orientasi kekerabatan yang masih kuat.

Bentuk lain dari sistem pelapisan yang terjadi dengan sendirinya adalah *gender*, fenomena ini walaupun tidak mutlak menentukan suatu pelapisan namun dalam beberapa hal juga menunjuk pada sistem itu. Sistem pewarisan pada beberapa masyarakat menunjukkan kecenderungan bahwa laki-laki berhak mewarisi lebih dari perempuan; atau dalam bidang pekerjaan, khususnya pada kehidupan masyarakat yang belum begitu modern, dominasi laki-laki terasa lebih kental dibandingkan dengan perempuan, partisipasi perempuan dalam dunia kerja relatif lebih terbatas; dibandingkan dengan laki-laki para pekerja perempuan pun relatif lebih banyak terdapat di strata yang lebih rendah, dan sering menerima upah atau gaji yang lebih rendah dari laki-laki.

Proses yang *ke-dua*, yaitu sistem pelapisan yang sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama, disamping dibeda-bedakan berdasarkan status yang diperoleh, anggota masyarakat dibeda-bedakan pula berdasarkan status yang diraihnya, sehingga menghasilkan berbagai jenis stratifikasi. Salah satu diantaranya adalah stratifikasi berdasarkan pendidikan (*educational stratification*); bahwa hak dan kewajiban warga negara sering dibeda-bedakan atas dasar tingkat pendidikan formal yang berhasil mereka raih.

Sistem stratifikasi yang lain yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ialah stratifikasi pekerjaan (*occupational stratification*). Di bidang pekerjaan modern kita mengenal berbagai klasifikasi yang mencerminkan stratifikasi pekerjaan, seperti misalnya perbedaan antara manager serta tenaga eksekutif dan tenaga administratif, buruh; antara tamtama, bintara, perwira pertama, perwira menengah, perwira tinggi.; Kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, kepala koordinator dan sebagainya.

Stratifikasi ekonomi (*economic stratification*), yaitu pembedaan warga masyarakat berdasarkan penguasaan dan pemilikan materi, pun merupakan suatu kenyataan sehari-hari. Dalam kaitan ini kita mengenal, antara lain, perbedaan warga masyarakat berdasarkan penghasilan dan kekayaan mereka menjadi kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Dalam masyarakat kita terdapat sejumlah besar warga yang tidak mampu memenuhi keperluan minimum manusia untuk hidup layak karena penghasilan dan miliknya sangat terbatas, tetapi ada pula warga yang seluruh kekayaan pribadinya bernilai puluhan miliar bahkan ratusan miliar rupiah. Di kalangan petani di pedesaan, kita menjumpai beberapa perbedaan antara petani pemilik tanah, petani penggarap dan buruh tani, yang mana masing-masing strata itu memiliki cara hidup tersendiri sesuai dengan kedudukannya (ekonomi) nya dalam masyarakat.

Seperti yang telah diuraikannya sebelumnya, bahwa ada pula sistem stratifikasi sosial yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan bersama; hal itu biasanya dilakukan terhadap pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal, seperti misalnya pemerintahan, perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, atau perkumpulan. Kekuasaan dan wewenang itu merupakan suatu unsur yang khusus dalam sistem pelapisan dalam masyarakat, unsur mana mempunyai sifat yang lain daripada uang, tanah, dan sebagainya dapat terbagi secara bebas di antara anggota suatu masyarakat tanpa merusak keutuhan masyarakat itu.

### 3. Tolok Ukur

Kalau kita mempelajari secara umum, sistem pelapisan sosial terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian lapisan atas yang terdiri dari individu-individu yang memiliki lebih hal-hal yang bernilai atau berharga dalam masyarakat; kedudukannya ini bersifat kumulatif dalam arti mereka yang memiliki uang banyak misalnya, akan mudah sekali untuk mendapatkan tanah, kekuasaan atau mungkin juga kehormatan. Ukuran atau kriteria yang biasanya dipakai untuk menggolong-golongkan anggota-anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ukuran *kekayaan*; ukuran ini dapat berupa kebendaan, barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak, orang-orang itu termasuk lapisan paling atas; kekayaan tersebut, misalnya dapat dilihat dari tempat tinggal, besarnya tempat tinggal, kendaraan-kendaraan, pakaian-pakaiannya yang dikenakan, kebiasaannya dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, yang semuanya itu dianggap sebagai *status simbol* atau lambang-lambang kedudukan seseorang yang membedakannya dengan orang kebanyakan,
2. Ukuran *kekuasaan*; barang siapa yang memiliki kekuasaan atau yang mempunyai wewenang terbesar, maka orang-orang itu menempati lapisan tertinggi dalam masyarakat.
3. Ukuran *kehormatan*; ukuran ini mungkin terlepas dari ukuran-ukuran kekayaan dan kekuasaan, ukuran semacam ini biasanya hidup pada bentuk-bentuk masyarakat yang masih tradisional, orang-orang yang bersangkutan adalah individu yang dianggap atau pernah berjasa besar dalam masyarakat; orang-orang yang paling dihormati atau yang disegani, ada dalam lapisan atas.
4. Ukuran *ilmu pengetahuan*. Ukuran ini biasanya dipakai oleh masyarakat-masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan. Akan tetapi ada kalanya ukuran tersebut menyebabkan akibat-akibat yang negatif, oleh karena kemudian ternyata bahwa bukan mutu ilmu pengetahuan yang dijadikan ukuran, akan tetapi gelar keserjanaan; sudah tentu hal ini mengakibatkan segala macam usaha untuk mendapatkan gelar tersebut, walau melalui mekanisme yang tidak benar.

Ukuran-ukuran tersebut di atas, tidaklah bersifat limitatif, oleh karena masih ada ukuran-ukuran lainnya yang dapat dipergunakan. Akan tetapi ukuran-ukuran itu adalah aspek yang menonjol sebagai dasar timbulnya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat. Pada beberapa masyarakat tradisionil di Indonesia, golongan pembuka tanahlah yang dianggap menduduki lapisan tertinggi; misalnya di Jawa, kerabat dan keturunan pembuka tanahlah yang dianggap oleh masyarakat desa sebagai kelas tertinggi dalam masyarakat. Kemudian menyusul para pemilik tanah, walaupun mereka bukan keturunan pembuka tanah; mereka disebut *pribumi*, *sikep* atau *kuli kenceng*. Lalu menyusul mereka yang hanya mempunyai rumah atau pekarangan saja (golongan ini disebut *kuli gundul*, *lindungatau indung*), dan akhirnya kelompok mereka yang hanya menumpang saja pada tanah milik orang lain.

Lapisan tertinggi dalam suatu masyarakat biasa disebut sebagai 'elite' masyarakat, bisa mencakup individu atau segolongan kecil yang mengendalikan masyarakat banyak; jadi disini yang pokok adalah nilai anggotanya. Keadaan ini dapat dijumpai pada setiap masyarakat, dan dianggap sebagai hal yang wajar, walaupun kadang-kadang tidak disukai oleh lapisan-lapisan lainnya, apalagi bila pengendaliannya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat umum.

Satu hal lagi berkenaan yang perlu diperhatikan dalam tolok ukur ini, bahwa ukuran-ukuran itu memiliki keberadaan ganda, satu sisi ukuran itu bisa berdiri sendiri, dan pada sisi lain ukuran itu bisa saling melengkapi (komplementer). Dalam banyak keadaan seseorang atau segolongan kecil tersebut bisa memiliki lebih dari satu ukuran; seorang pimpinan masyarakat, berarti dia yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam masyarakat, bisa juga sebagai orang yang paling dihormati dalam masyarakat tersebut; atau bisa saja, selain dari aspek kekuasaan dan kehormatan tadi, dia adalah seorang intelektual (ilmu pengetahuan) yang kebetulan memiliki aset material (kekayaan) terbanyak dalam masyarakat yang bersangkutan .

#### **4. Bentuk-Bentuk Pelapisan Sosial**

Dalam sosiologi, sistem pelapisan masyarakat ini sekurangnya menggambarkan dua bentuk, yaitu stratifikasi sosial tertutup (*closed stratification*) dan stratifikasi sosial terbuka (*open social stratification*). Menurut J. Milton Yinger (1966), secara teoritis, keterbukaan suatu sistem stratifikasi diukur oleh mudah-tidaknya dan sering-tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu memperoleh status dalam strata yang lebih tinggi, setiap anggota masyarakat dapat menduduki status yang berbeda dengan status orang tuanya, bisa lebih tinggi bisa lebih rendah; sedangkan stratifikasi sosial yang tertutup ditandai dengan keadaan manakala setiap anggota masyarakat tetap berada pada status yang sama dengan orang tuanya.



Dalam sistem pelapisan yang terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapannya sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan bawahnya. Pada umumnya pelapisan terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk memperkembangkan kecakapannya, dan karena itu, maka sistem tersebut lebih sesuai untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup.

Dalam sistem pelapisan yang tertutup, kedudukan orang-perorangan ditentukan oleh kelahirannya; seorang Charles di negeri Inggris adalah seorang pangeran dan calon raja Inggris, dan dia ada seperti itu karena orang tuanya adalah ratu Inggris. Dalam batas-batas tertentu, sistem pelapisan tertutup juga ditemukan pada masyarakat Bali. Menurut kitab suci orang Bali masyarakat terbagi dalam empat lapisan, yaitu *Brahmana*, *Satria*, *Vaicya* dan *Sudra*. Ketiga lapisan pertama disebut '*triwangsa*' sedangkan lapisan terakhir disebut '*jaba*' yang merupakan lapisan dengan jumlah warga terbanyak di antarmasyarakat Bali. Keempat lapisan itu terbagi lagi lapisan-lapisan khusus; biasanya orang-orang dapat dikenali dari kasta mana dia berasal dilihat dari gelar yang mengikutinya, gelar-gelar mana diwariskan menurut garis keturunan laki-laki yang sefihak patrilineal, adalah *Ida Bagus* sebagai gelar yang menunjukkan gelar orang Brahmana; *Tjokorda*, *Dewa*, *Ngahan*, *Bagus*, sebagai gelar yang menunjukkan gelar orang Satria; *I Gusti*, *Gusti*, merupakan gelar bagi orang Vaicya. Orang-orang Sudra juga memakai gelar seperti *Pande*, *Kbon*, *Pasek*, dan selanjutnya yang dahulu kala berhubungan erat dengan pekerjaan orang-orang yang memakai gelar yang bersangkutan. Walaupun gelar-gelarnya tidak memisahkan golongan-golongan secara ketat, akan tetapi sangatlah penting bagi sopan santun pergaulan. Di samping itu hukum adat juga menetapkan hak-hak bagi si pemakai gelar, misalnya dalam memakai tanda-tanda, perhiasan-perhiasan, pakaian tertentu dan lain-lain. Kehidupan sistem kasta di Bali tersebut umumnya tampak jelas dalam hubungan perkawinan; terutama seorang gadis dari suatu kasta tertentu, pada umumnya dilarang untuk bersuamikan seseorang dari kasta yang lebih rendah.

Dalam kenyataannya ternyata agak sukar menemukan bentuk masyarakat yang sistem pelapisannya benar-benar tertutup ataupun benar-benar terbuka. Dalam satu penelitiannya, Yinger memperkirakan bahwa dalam bentuk masyarakat yang paling terbuka, yaitu masyarakat industri modern, hanya sepertiga anggota masyarakat yang statusnya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang tuanya, sedangkan dupertiganya adalah sama; keadaan ini sebenarnya bisa mengindikasikan bahwa nilai-nilai yang ditanam orang tua terhadap diri anak-anak mereka masih dijadikan sebagai suatu ukuran kehidupan, mereka masih mengidentifikasi diri terhadap segala gagasan, sikap, dan tindakan orang tuanya, walaupun mungkin prosesnya berlangsung tanpa secara disadari.

Kita mengenal sistem sosial yang berlaku di India adalah berdasarkan kasta, yang mengacu pada sistem pelapisan tertutup; Seorang tokoh sosiologi India, M. N. Srinivas, (1952) menguraikan bahwa sistem kasta di India (yang diberi nama *varna*) sebenarnya terdiri atas ribuan *jati*, suatu kelompok endogen yang mempraktekan suatu pekerjaan tradisional dan mempunyai otonomi tertentu dalam bidang budaya, ritual, dan hukum. Srinivas mengamati bahwa kadangkala hubungan hipergami antar kasta dimungkinkan, walaupun itu

selalu terwujud dalam pernikahan seorang laki-laki dari kasta yang lebih tinggi dengan seorang perempuan dari kasta lebih rendah dan tidak sebaliknya. Srinivas pun menguraikan bahwa suatu kelompok kasta rendah sering dapat pindah status ke kasta lebih tinggi dengan jalan meniru gaya kasta yang lebih tinggi itu, suatu proses yang oleh Srinivas disebut sebagai *sanskritization*, meskipun proses ini terjadi dalam beberapa generasi. Adanya proses *sanskritization* ini sudah merupakan indikasi bahwa warga kasta lebih rendah tidak selalu menerima status mereka yang rendah.

## **5. unsur-unsur penting dalam sistem pelapisan sosial**

Selo Soemardjan (1964), seorang tokoh sosiologi Indonesia, menyatakan bahwa hal yang mewujudkan unsur-unsur dalam teorisosiologi tentang sistem berlapis lapis dalam masyarakat, adalah kedudukan (*status*) dan peranan (*role*); kedudukan dan peranan ini kecuali merupakan unsur-unsur baku dalam sistem berlapis-lapis, juga mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial masyarakat; Ralph Linton (1967) mengartikan sistem sosial itu sebagai pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antar individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu-individu tersebut. Dalam hubungan-hubungan timbal balik tersebut, kedudukan dan peranan individu mempunyai arti yang penting, karena keberlangsungan hidup masyarakat tergantung daripada keseimbangan kepentingan-kepentingan individu –individu termaksud. Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang kedudukan dan peranan ini akan dibicarakan tersendiri di bawah ini.

### **5.1. Kedudukan (status)**

Kadang-kadang dibedakan antara pengertian-pengertian ‘kedudukan’ (*status*), dengan ‘kedudukan sosial’ (*social status*); *kedudukan* diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lainnya dalam kelompok tersebut atau tempat suatu kelompok sehubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi. *Kedudukan sosial* artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Kedudukan sosial tidaklah semata-mata berarti kumpulan kedudukan-kedudukan seseorang dalam kelompok-kelompok yang berbeda, akan tetapi kedudukan-kedudukan sosial tersebut mempengaruhi kedudukan orang tadi dalam kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Untuk

lebih mudah mendapatkan pengertian, kedua istilah tersebut di atas akan dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah 'kedudukan' (status) saja.

Kedudukan, sebagaimana lazim dipergunakan, mempunyai dua arti :

- a. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu pola tertentu; dengan demikian seseorang dikatakan memiliki beberapa kedudukan, oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola-pola kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan kerangka masyarakat secara menyeluruh.
- b. Apabila dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanya merupakan kumpulan hak-hak dan kewajiban-kewajiban termaksud hanya dapat terlaksana melalui perantaraan individu-individu, maka agak sukar untuk memisahkannya secara tegas dan kaku. Hubungan antara individu dengan kedudukan, dapat diibaratkan sebagai hubungan pengemudi mobil dengan tempat atau kedudukan si pengemudi dengan mesin mobil tersebut; tempat mengemudi dengan mesin mobil tersebut; tempat mengemudi dengan segala alat untuk menjalankan mobil adalah alat-alat tetap yang penting untuk menjalankan serta mengendalikan mobil tersebut, pengemudi dapat berganti-ganti, yang mungkin akan dapat menjalankannya dengan lebih baik, atau bahkan lebih buruk.

Dalam masyarakat, sekurangnya ada tiga macam kedudukan, yaitu :

### ***1. Ascribe status,***

Yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan; kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran. Pada umumnya ascribe status dijumpai pada masyarakat-masyarakat dengan sistem pelapisan yang tertutup, atau masyarakat dimana sistem pelapisannya tergantung pada perbedaan rasial. Namun demikian, ascribe status juga ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat dengan sistem pelapisan yang terbuka; misalnya kedudukan laki-laki dalam satu keluarga, kedudukannya berbeda dengan kedudukan istri atau anak-anaknya; ascribe status disini walaupun tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi pada umumnya sang ayah atau suami adalah kepala keluarga batihnya. Untuk menjadi kepala keluarga batih tersebut, laki-laki tidak perlu mempunyai darah bangsawan atau kasta tertentu, sosok seorang ayah tetap saja sebagai kepala rumah tangga.

### ***2. Achieved Status***

Adalah kedudukan yang dicapai seseorang dengan usaha yang disengaja; kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran, akan tetapi bersifat terbuka bagi siapa saja hal mana tergantung dari kemampuannya masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya; seseorang yang ingin menjadi pemain bulu tangkis yang handal, tentunya harus berlatih bulu tangkis dengan tekun, seseorang yang ingin menjadi dokter, tentunya harus belajar kedokteran. Kecenderungan tercapainya achieved status ini biasanya ditemukan dalam bentuk-bentuk masyarakat dengan sistem pelapisan yang terbuka, hal ini bisa terjadi karena nilai-nilai dalam masyarakat memungkinkan untuk berlakunya tindakan-tindakan seperti itu. Anak seorang Rudy Hartono belum tentu akan menjadi pemain bulu tangkis yang handal, walaupun kalau hanya untuk sekedar menjadi juara RT mungkin bisa, sedangkan orang tua Rudi Hartono mungkin seorang pebulu tangkis tetapi prestasinya tidak sehebat anaknya.

### ***3. Assigned Status***

Satu bentuk kedudukan yang mempunyai hubungan erat dengan achieved status, yaitu kedudukan yang diberikan karena alasan-alasan tertentu; dalam arti bahwa suatu kelompok, golongan, atau masyarakat memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi kadang-kadang kedudukan tersebut diberikan, karena seseorang telah lama menduduki suatu jabatan tertentu, seperti di pedesaan ada istilah 'lurah hormat' adalah satu gelar yang diberikan kepada seorang mantan pemuka desa yang dianggap sangat berjasa atas kemajuan desanya. Kedudukan yang diberikan ini diwujudkan dalam bentuk penghormatan gelar tertentu seperti '*datuk*' pada masyarakat Sumatera Barat, '*sir*' pada masyarakat Inggris, atau '*andi*' pada masyarakat Makasar; Individu-individu yang mendapatkan kedudukan ini tidak dibebankan atas kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya, namun mereka sedikitnya mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus yang tidak diberikan pada orang kebanyakan, di samping itu kedudukan ini tidak terbatas diberikan kepada anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan, tetapi bisa juga kepada orang luar masyarakat tersebut.

Telah kita fahami bahwa manusia itu hidup berkelompok, kalau mengacu pada teori Van der Zanden (1979), seorang individu bisa diidentifikasi sebagai anggota kategori statistik, kategori sosial, kelompok sosial, asosiasi, dan kerumunan, belum lagi bila dilihat dari aspek kepentingan maka seorang manusia itu bisa termasuk dalam beberapa kelompok kepentingan. Berkenaan dengan keberadaannya dalam kelompok-kelompok, maka tentu setiap orang tidak akan luput dari kedudukan-kedudukannya baik dalam lingkup persekutuan hidup yang kecil maupun dalam lingkup masyarakat yang lebih besar. Seorang bapak guru misalnya, selain kedudukannya sebagai guru dia juga termasuk kategori laki-laki dewasa, dia juga adalah anak dari kedua orang tuanya, mungkin juga selain guru dia dipercaya untuk mengelola urusan koperasi sekolah, atau mungkin juga dia aktif sebagai pengurus PGRI, atau

mungkin juga dia sebagai ayah bagi anak-anaknya sekaligus sebagai suami dari istrinya, dan sebagainya.

Ada kalanya dari seperangkat kedudukan seseorang dalam masyarakat terjadi pertentangan-pertentangan berkaitan dengan kedudukannya itu, keadaan mana dalam istilah sosiologi disebut sebagai status konflik. misalnya bapak guru seperti di atas tadi, yang pada suatu saat harus menghukum seorang siswa yang melanggar aturan sekolah, dimana siswa tersebut adalah puteranya sendiri, atau seorang jaksa yang harus menuntut anaknya sendiri karena melakukan tindak pidana, atau seorang petugas pajak yang harus memungut pajak penghasilannya sendiri. Konflik antar kedudukan-kedudukan tersebut tidak bisa dihindari berhubung kepentingan-kepentingan individu tidak selalu sesuai atau sejalan dengan kepentingan-kepentingan masyarakatnya, sehinggasing kali sulit bagi individu tersebut untuk mengatasinya dengan benar.

Kedudukan macam mana yang dimiliki seseorang atau kedudukan apa yang melekat padanya, dapat terlihat pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu, yang dalam ilmu sosiologi dinamakan *status symbol*; ciri-ciri tersebut seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ada beberapa ciri tertentu yang dianggap sebagai *status symbol*, misalnya cara berpakaian, pergaulan, cara-cara mengisi waktu senggang, memilih tempat tinggal, berkendara, rekreasi, serta kebiasaan-kebiasaan lain yang membedakannya dengan orang-orang kebanyakan. Status symbol ini tidak hanya melekat pada golongan atau lapisan tertentu saja, namun setiap lapisan biasanya mempunyai ciri-ciri tersendiri.

Satu bentuk penghargaan yang ada dalam masyarakat modern, khususnya pada masyarakat perkotaan di Indonesia, adalah tingkat penguasaan ilmu yaitu dalam bentuk gelar-gelar intelektual; seseorang yang memiliki gelar kesarjanaan tertentu setidaknya telah membuktikan bahwa yang memperolehnya telah memenuhi beberapa persyaratan tertentu dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang khusus. Hal ini menyebabkan terjadinya beberapa akibat yang negatif, antara lain bahwa, yang dikejar bukanlah ilmu pengetahuannya, akan tetapi gelar kesarjanaannya. Gelar tersebut kemudian menjadi *status symbol* tanpa menghiraukan bagaimana isi yang sesungguhnya; banyak dari mereka yang merasa malu karena tidak memiliki gelar kesarjanaan, padahal kedudukan mereka di dalam masyarakat telah terpandang; segala cara diupayakan untuk mendapatkan gelar itu tanpa memperdulikan lagi apakah kemudian mereka dapat mempertanggung jawabkan terhadap apa yang telah mereka upayakan itu.

## **5.2. Peranan (Role)**

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan, dimana apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang itu telah menjalankan suatu peran. Peranan dan kedudukan itu saling melengkapi, kedua-duanya tidak dapat dipisahkan, oleh karena yang satu tergantung pada yang lain dan

demikian sebaliknya. Yang membedakan dari keduanya adalah menyangkut proses, harus ada kedudukan terlebih dahulu baru kemudian ada peranan, keadaan ini tidak bisa terbalik.

Setiap orang mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya dan hal itu sekaligus berarti bahwa peranan tersebut menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah bahwa hal itu mengatur perikelakuan seseorang, dan juga bahwa peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, sehingga dengan demikian, orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perikelakuan sendiri dengan perikelakuan orang-orang sekelompoknya. Maka hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu-individu dalam masyarakat. Peranan-peranan tersebut diatur oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya norma-norma kesopanan yang menuntut seseorang untuk menyapa orang banyak dikala dia berjalan melintasinya, maka dia harus berlaku seperti itu, atau norma kesopanan yang mengatur sikap seorang penumpang terhadap orang lanjut usia di kendaraan umum, maka dia harus mendahulukan orang tua itu untuk duduk.

Sekarangnya suatu peranan itu mencakup tiga hal :

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi struktur sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dikemukakan perihal fasilitas-fasilitas bagi peranan individu (*role facilities*); biasanya masyarakat memberikan fasilitas-fasilitas bagi individu agar dia dapat melaksanakan peranannya. Lembaga-lembaga masyarakat merupakan bagian masyarakat yang banyak menyediakan peluang-peluang untuk melaksanakan peranan. Kadang-kadang struktur suatu golongan kemasyarakatan, menyebabkan fasilitas-fasilitas tersebut bertambah; misalnya perubahan organisasi suatu sekolah yang memerlukan penambahan guru, pegawai administrasi, penjaga sekolah dan sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, hal itu juga dapat mengurangi peluang-peluang, seperti misalnya apabila terpaksa diadakan rasionalisasi sebagai akibat perubahan struktur dan organisasi.

Agaknya pertentangan-pertentangan kedudukan (*status conflict*) membawa pengaruh terhadap peranan ini, karena tidak jarang terjadi suatu pemisahan antara individu dengan

peranan yang sesungguhnya harus dilaksanakan (disebut sebagai *role- distance*) . Gejala tadi timbul apabila seseorang merasa tertekan karena dia merasa dirinya tidak sesuai untuk melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat atau bahkan menyembunyikan dirinya, apabila dia berada dalam lingkungan sosial yang berbeda. Lingkungan sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial dimana seseorang mendapat tempat serta kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Setiap peranan bertujuan agar antara individu yang melaksanakan peranan dengan orang-orang di sekitarnya yang tersangkut atau ada hubungannya dengan peranan tersebut, terdapat hubungan yang diatur oleh nilai-nilai sosial yang diterima dan ditaati kedua belah pihak. Nilai-nilai sosial tersebut misalnya nilai keagamaan antara pemuka agama dengan pemeluk-pemeluk agama yang bersangkutan, nilai kesehatan antara dokter dengan pasien, nilai ekonomi antara pedagang dengan pembeli. Apabila hal itu tidak terpenuhi oleh individu yang bersangkutan, maka terjadilah *role-distance*.

Pembahasan tentang berbagai macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat dianggap penting karena didalamnya memuat beberapa hal, yaitu :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan keberlangsungannya
2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu untuk melaksanakannya, mereka harus terlebih dahulu dilatih dan mempunyai motivasi tinggi untuk melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tidak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang dianggap terlalu besar berkaitan dengan kepentingan-kepentingan pribadinya
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat meberikan peluang-peluang yang seimbang, bahkan sering kali terlihat bertapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

## **6. Kelas Sosial**

Konsep kelas merupakan suatu konsep yang sudah lama digunakan dalam ilmu sosial, makna yang diberikan pada konsep tersebut berbeda-beda; meskipun konsep itu menduduki posisi sangat penting dalam teori Karl Marx (, namun ia tidak pernah mendefinisikannya secara tegas, yang jelas ia mengaitkannya dengan pemilikan alat produksi. Demikian juga dengan Max Weber (1958), ia tidak membatasi konsep tersebut pada pemilikan alat produksi tetapi membeikan makna yang lebih luas, sehingga selain mencakup penguasaan atas barang meliputi pula peluang untuk memperoleh penghasilan. Menurut Giddens (1989), peluang untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang dimaksud Weber tersebut ini tidak

hanya berupa penguasaan atas barang tetapi dapat pula berupa keterampilan dan kemampuan yang antara lain tercermin dalam ijazah.

Peter L Berger (1978), seorang ahli sosiologi modern, menganggap sistem kelas sebagai tipe stratifikasi yang menjadi salah satu dasar posisi-posisi yang umum dalam masyarakat menurut ukuran-ukuran ekonomi; dari perumusannya ini tampak bahwa konsep kelas ini dikaitkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sehubungan dengan kriteria kemampuannya secara ekonomi.

Apabila kita menelaah istilah kelas sebagaimana yang dipergunakan dalam teori Marxisme, maka terdapat perbedaan prinsipil dengan pengertian umum tentang kelas yang dipakai dalam sosiologi, perbedaan itu mencakup :

- Dalam Marxisme, istilah kelas cenderung hanya digunakan dalam kerangka ekonomi saja; walaupun dengan adanya kelas-kelas tersebut ternyata berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan kebudayaan dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, Marxisme membagi kelas dalam masyarakat menjadi dua bentuk; pertama, kelas yang memiliki tanah dan alat-alat produksi, dan kedua kelas yang tidak memiliki itu dan hanya memiliki tenaga untuk disumbangkan dalam proses produksi.
- Menurut konsep Marxisme, kelas itu senantiasa berada dalam pertentangan untuk berebutan kekuasaan, sedangkan sosiologi lebih menekankan pada hubungan antara dan bekerja sama tanpa pertentangan,
- Marxisme cenderung menekankan prediksi keterbentukan masyarakat itu ditandai dengan hilangnya semua kelas dalam masyarakat sehingga terjadi suatu *classless society* (masyarakat tanpa kelas), sedangkan menurut sosiologi bahwa kelas itu akan ada sepanjang masa dalam tiap masyarakat yang hidup teratur.

Pada beberapa masyarakat di dunia, terdapat kelas-kelas yang tegas sekali, oleh karena segenap anggota warga masyarakat itu memperoleh sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilindungi oleh hukum yang berlaku disana. Warga-warga masyarakat semacam itu seringkali mempunyai kesadaran dan konsepsi yang jelas tentang seluruh susunan lapisan dalam masyarakatnya. Kelompok '*abdi dalem*' seperti yang ada di keraton Yogyakarta, adalah orang-orang yang menjadi abdi raja di keraton Yogya, yang dibedakan dengan orang-orang biasa lainnya; sebagian besar dari orang biasa atau rakyat pada umumnya menyadari bahwa '*abdi dalem*' ini tingkatan sosialnya lebih tinggi dari mereka, walau secara ekonomi mungkin tidak demikian; kebanggaan dari seorang '*abdi dalem*' bukan tentang materi, namun kebanggaannya bahwa dia termasuk orang yang bisa mengabdikan diri kepada raja, yang tidak semua orang bisa mencapai ini.

Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, menurut Soerjono Soekanto (1989) maka dalam masyarakat itu akan dijumpai beberapa kriteria yang tradisional, yaitu :

1. Besarnya atau ukuran jumlah anggota-anggotanya
2. Kebudayaan yang sama, yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya
3. Kelanggengan



4. Tanda atau lambang yang merupakan status symbol
5. Batas-batas yang tegas (bagi kelompok itu, terhadap kelompok lain)
6. Antagonisme tertentu

Sehubungan dengan kriteria tersebut di atas, kelas menyediakan kesempatan-kesempatan atau fasilitas-fasilitas hidup tertentu (*life chances*) bagi warga-warganya, yaitu misalnya keselamatan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi dan sebagainya, yang dalam arti-arti tertentu tidak dimiliki oleh warga-warga kelas lainnya. Kecuali daripada itu, kelas juga mempengaruhi gaya dan tingkah-laku hidup (*life style*) masing-masing warganya. Oleh karena kelas-kelas yang ada dalam masyarakat mempunyai perbedaan dalam kesempatan-kesempatan menjalani jenis pendidikan atau rekreasi tertentu misalnya, maka ada perbedaan pula dalam apa yang telah dipelajari warga-warganya, perikelakuannya dan sebagainya. Dalam masyarakat Indonesia terutama di kota-kota besar, dikenal suatu pembedaan antara golongan yang pernah mengalami pendidikan Barat (terutama pendidikan Belanda) dengan golongan yang tidak pernah mengalaminya; tidak sembarang orang bisa mendapatkan pendidikan ini, mereka yang bersekolah umumnya adalah orang yang terpendang dalam masyarakat, kalau tidak orang yang secara ekonomis berkecukupan, mereka adalah para keturunan penguasa setempat atau pegawaipemerintahan.

Kamanto Sunarto (2004) menguraikan bahwa secara ideal sistem kelas merupakan suatu sistem stratifikasi terbuka karena status didalamnya dapat diraih melalui usaha pribadi; dalam kenyataan sering terlihat bahwa sistem kelas mempunyai ciri tertutup, seperti misalnya endogami kelas. Pergaulan dan pernikahan misalnya, lebih sering terjadi antara orang-orang yang kelasnya sama daripada dengan orang dari kelas yang lebih rendah atau lebih tinggi.

## **7. Upaya Masyarakat Untuk Mengurangi Ketidaksamaan**

Sebagaimana kita lihat, masyarakat yang mempunyai sistem stratifikasi sosial tertutup seolah-olah menunjang ketidaksamaan sosial sehingga tidak kondusif terhadap suatu mobilitas sosial. Masyarakat dengan sistem yang lebih terbuka, di lain pihak, menganut azas persamaan sosial dan membenarkan serta menganjurkan mobilitas sosial; dalam masyarakat demikian setiap orang akan mengharapkan perlakuan dan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan yang dibawa sejak lahir seperti perbedaan gender, usia, ras, etnik, dan agama.

Kamanto Sunarto mengisyaratkan bahwa berbagai masyarakat mungkin berbeda pandangannya terhadap konsep kesamaan ini; pada satu sisi, ada masyarakat yang berpandangan bahwa apa yang dapat diperoleh seseorang anggota masyarakat tergantung pada kemampuannya. Masyarakat Amerika, merupakan masyarakat yang cenderung menekankan pada pentingnya asas ini, setiap anggota masyarakat dianggap berhak atas kesempatan yang sama (*equality of opportunity*) untuk meraih sukses melalui prestasi. Ini

berarti bahwa sukses yang diraih seseorang tergantung pada prestasinya; orang yang berprestasi dapat meraih status tinggi serta segala imbalan yang menyertainya, sedangkan orang yang tidak berprestasi akan tetap menduduki status rendah.

Pada sisi yang lain, ada masyarakat yang lebih menekankan pada asas yang menyatakan bahwa pemerataan berarti pemerataan pendapatan, meskipun asas ini sangat menonjol pada komunisme yang berpandangan bahwa seseorang diharapkan menyumbangkan tenaganya pada masyarakat sesuai dengan kemampuannya tetapi akan memperoleh imbalan sesuai dengan keperluannya, namun asas bahwa pemberian imbalan dalam masyarakat perlu didasarkan pada pemenuhan keperluan pokok anggota masyarakat pun dianut oleh banyak masyarakat yang tidak menganut komunisme.

Beberapa masyarakat bahkan berusaha mengurangi ketidaksamaan dalam masyarakat dengan jalan membatasi perbedaan antarindividu. Usaha membatasi perbedaan antarindividu ini sering dimulai sejak usia dini, karena disadari bahwa keluarga merupakan sumber utama ketidaksamaan sosial. Dalam masyarakat komunis seperti di Uni Soviet dan RRC di masa lalu, anak-anak itu telah sejak lahir dipisahkan dari orang tuanya dan dididik bersama dalam suatu komune tempat mereka disosialisasikan untuk menganut asas persamaan, hal serupa dijumpai di Israel dengan sistem yang disebut *kibbutz*.

## **8. Perlunya Sistem Pelapisan Sosial Dalam Masyarakat**

Manusia pada umumnya bercita-citakan agar ada perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat, akan tetapi cita-cita itu akan selalu terbentur dengan suatu kenyataan yang berlainan. Setiap masyarakat harus menempatkan individu-individu pada tempat-tempat tertentu dalam struktur sosial dan mendorong mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai akibat penempatan tersebut. Dengan demikian, masyarakat menghadapi dua persoalan, yaitu masalah penempatan individu-individu dan mendorong mereka agar melaksanakan kewajibannya.

Apabila misalnya semua kewajiban tersebut selalu sesuai dengan keinginan-keinginan si individu-individu, sesuai dengan kemampuan-kemampuan individu-individu tersebut dan seterusnya maka persoalannya tidak akan terlalu sulit untuk dilaksanakan. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian, kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tertentu sering memerlukan kemampuannya dan latihan-latihan tertentu, dan pentingnya kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tersebut juga tidak selalu sama. Maka tidak akan dapat dihindarkan lagi bahwa masyarakat harus menyediakan beberapa macam sistem pembalasan jasa sebagai pendorong agar si individu mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang sesuai dengan posisinya dalam masyarakat.

Balas jasa tersebut dapat berupa insentif di bidang ekonomi, estetis atau mungkin juga secara perlambang dan yang paling penting adalah bahwa individu-individu tersebut mendapatkan hak-hak, yang merupakan himpunan kewenangan-kewenangan untuk

melakukan tindakan-tindakan atau untuk tidak berbuat sesuatu. Sering pula ditemukan hak-hak yang secara tidak langsung berhubungan dengan kedudukan dan peranan seseorang, akan tetapi hak-hak tersebut sedikit banyaknya merupakan pendorong bagi si individu. Hak-hak tersebut di lain pihak juga mendorong individu-individu untuk memperoleh kedudukan-kedudukan dan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat.

Dengan demikian, maka mau tidak mau ada sistem berlapis-lapis dalam masyarakat, oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam dalam struktur sosial dan mendorong agar melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Pengisian tempat-tempat tersebut, merupakan daya pendorong agar masyarakat bergerak sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi wujudnya dalam setiap masyarakat juga berlainan, karena hal itu tergantung pada bentuk dan kebutuhan masing-masing masyarakat. Jelas bahwa kedudukan dan peranan yang dianggap tinggi oleh setiap masyarakat adalah kedudukan dan peranan yang dianggap terpenting serta memerlukan kemampuan dan latihan-latihan yang maksimal.

Tidak banyak individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian, bahkan mungkin hanya segolongan kecil dalam masyarakat. Maka oleh sebab itu pada umumnya warga lapisan atas (*upper class*) tidak terlalu banyak apabila dibandingkan dengan lapisan menengah (*middle class*) dan lapisan bawah (*lower class*); tidak mengherankan bila sistem pelapisan sosial ini diwujudkan dalam bentuk gambar akan selalu berbentuk kerucut; semakin ke atas semakin runcing, menandakan, semakin atas suatu lapisan semakin sedikit orang yang berkepentingan di sana.

## **Daftar Bacaan**

Berghe, van den, Pierre, (1967). *Dialectic and Functionalism: Toward a Synthesis*, dalam N.J. Demerath III et.al.eds., *System, Change, and Conflict*, The Free Press, New York, Collier-McMillan limited, London.

Furnivall, J.S., (1967), *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, Cambridge at The University Press.

Geertz, Clifford. (1989). *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa* (terj.), Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.

- Grusky, David B.ed. (1994). *Social Strtification, Class, Race And Gender*; Boulder-San Fransisco-Oxford: Westview Press.
- Lawang, Robert. (1985). *Sistem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Penerbit PT Kurunika Universitas Terbuka.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sanderson, (2000) *Sosiologi Macro, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Saripudin, Didin (2005). *Mobilitas dan Perubahan Sosial*, Penerbit : Masagi Foundation, Bandung
- Soekanto, Soerjono. (1979). *Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Soemardjan, Selo-Soemardi, (1974). *Setangkai Bunga Sosiologi*; Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sunarto, Kamanto. (2004). *Pengantar Sosiologi*, Penerbitan : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.